

WAWASAN

# TRIDHARMA

MAJALAH ILMIAH KOPERTIS WILAYAH IV

NOMOR 6 TAHUN XXIV JANUARI 2012



■ Bagaimana Mengasah Kemampuan dan Pengembangan Diri Anda

Oleh : Drs. H. Iding Syamsudin, MM

■ Penggunaan Pektin Glukosa pada Proses Pemasakan Serat Kapas

Oleh : Ir. Darmiyanti, M.Si

■ Peranan Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Oleh : Drs. Akhmad Yazidi, M.Pd

■ Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia tentang Pembiayaan KUMKM dan Sektor Rill Periode 1973 s/d 2008

Oleh : Dr. Heri Nugraha, SE, M.Si

■ Peran Mikroorganisme dalam Pertanian Organik

Oleh : Dra. Ina Darliana, M.Si



ISSN 0215-8256

STT No. 2009/SK/DITJEN PPG/STT/1994



# Wawasan TRIDHARMA

Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV

Informasi Komunikasi dan Pengkajian IPTEK

## PELINDUNG

Koodinator Kopertiw Wilayah IV

## PEMIMPIN UMUM

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV

## PIMPINAN REDAKSI/

### PENANGGUNGJAWAB

Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS

### PENASEHAT/KONSULTAN REDAKSI

Prof. Dr. Bambang Hidayat

Prof. Dr. Hatta, SH, MH.

### PENYUNTING PELAKSANA

Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS

Dr. Budi Hartanto, M.Sc.

Prof. Dr. Hj. Atie Rachmatie, M.S.

Prof. Dr. Hj. Dewi Laelatul Badriah, M.Kes.

Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Si.

Dr. Erni Rusyani, MS.

Dr. Titin Rostini.

Dr. Sayu Putu Yuni Paryati, drh, M.Si.

### PENYUNTING AKHIR

Prof. Dr. Hj. Atie Rachmatie, M.Si.

Dr. Erni Rusyani, MS.

### SEKRETARIS REDAKSI

Ade Nedi Supardi, Drs.

### PENGELOLA USAHA

Kopkar Kopertis Wilayah IV

Jl. Penghulu Hasan Mustofa No. 38

Tlp. (022) 7272531 – 7275630 Bandung.

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar .....	2
Bagaimana Mengasah Kemampuan dan Pengembangan Diri Anda - Oleh: Drs. H. Iding Syamsudin, MM .....	3
Penggunaan Pektin Glukosa Pada Proses Pemasakan Serat Kapas - Oleh: Ir. Darmiyanti, M.Si .....	8
Perubahan Temperatur Atmosfer Bumi Akibat GAS Rumah Kaca - Oleh: Drs. Yusron Suwarso, MS .....	12
Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Pembentukan Karakter - Oleh: Prof. Dr. H. Endang Komara, Drs., M.Si .....	17
Pengaruh Jumlah Tabungan Nasabah Terhadap Profitabilitas PT. BPR SAHAT SENTOSA Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya - Oleh: Suminawati, M.Pd. ....	22
Penerapan Teknologi Pada PT. Sahabat Ternak Abadi (STA) Sebagai Perusahaan Inti Dalam Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler - Oleh: Ir. Sulistyio Sidik Purnomo .Msi , Dr. Ir. Machfud, MS, Prof. Dr. Ir. H. Endang Gumbira-Sa'id, MA Dev, Dr. Ir. Asnath Maria Fuah, MS .....	28
Peranan Bahasa Indonesia Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Nasionalisme) Indonesia - Oleh : Drs. Akhmad Yazidi, M.Pd .....	37
Mutu Pendidikan dan Partisipasi Kaum Buruh Indonesia Dalam Industri - Oleh: Drs. Abdul Jana, MM.Pd .....	44
Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan KUMKM dan Sektor Rill Periode 1973 s/d 2008 - Oleh: Dr. Heri Nugraha. SE. MSI .....	52
Peran Mikroorganisme Dalam Pertanian Organik - Oleh: Dra. Ina Darlana, Msi .....	59
Sistematika .....	64



## Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan KUMKM dan Sektor Rill Periode 1973 s/d 2008

Dr. Heri Nugraha. SE. MSI

### Abstrak

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha kecil perlu diberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Di bidang keuangan, perbankan pada dasarnya telah memberikan perhatian yang cukup besar dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit kecil, berbagai macam skim kredit telah dikembangkan sejak tahun 70 an sampai dengan sekarang, namun proses perbaikan dan penyesuaian terhadap skim-skim yang ada tetap diperlukan.

Namun disadari bahwa pemanfaatan fasilitas kredit perbankan belum dapat dilakukan secara optimal oleh sektor usaha tersebut, karena berbagai kendala yang dihadapi baik oleh sektor perbankan maupun pelaku KUMKM. Untuk itu, masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses KUMKM kepada kredit perbankan dengan cara melakukan penyempurnaan kebijaksanaan Kredit Usaha Kecil, yang saat ini dikenal dengan skim kredit KUMKM, untuk memberikan iklim yang kondusif, perlu dikembangkan sistem kelembagaan perbankan yang sehat agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada KUMKM, dan perlu pengembangan berbagai program dan proyek untuk memperluas pembiayaan ke sektor usaha yang strategis dan berdampak luas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kredit KUMKM secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

### I. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang mengarah kepada pemberdayaan KUMKM menjadi petunjuk yang jelas bahwa KUMKM sebagai bagian dari pelaku ekonomi mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah. Hal ini tentu akan menjadi kenyataan tidak terhindarkan bahwa setiap

pelaku usaha Perbankan yang ada di Indonesia harus membantu dalam pemberdayaan KUMKM dengan membuka akses kredit untuk mendukung usahanya.

Sebagaimana kita ketahui bersama saat ini, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) masih mendapat tempat tertinggi di mata seluruh elemen

bangsa, terutama pelaku bisnis. KUMKM tidak lagi dipandang dengan sebelah mata. Alasannya sederhana saja. Sejarah keterpurukan ekonomi Indonesia mencatat, ketika sebagian besar kelompok usaha besar (korporasi) kolap dilanda badai krisis moneter (krismon) pada awal 1998, KUMKM tetap hidup dan bahkan mampu

bergerak maju hii heran jika perbai mengucurkan da KUMKM hingga triliun lebih.

KUMKM tel andil serta kontri besar terhadap lapangan kerja. M Indonesia (BI), s menyerap 79,04 atau 99% dari tot yang bekerja. Ki terhadap total i bruto (PDB) cukup 57%. Dengan ko peran KUMKM ba bangsa menjadi Kendati begitu, kesempatan y pemerintah untu KUMKM masih optimal. Akibatnya KUMKM pun sesu maksimal. Secara persoalan utama jadi pengganjalny:

a. Masalah m *problems*), yak modal, kualitas manusia, penges dan akses pemasa b. Kalaupun sua berhasil melewa keuangan dan masalah lanji *problems*) masih yakni pengenala pasar baik do ekspor yang san minim.

c. Permasalahan adalah *intermedia* datang dari instar perizinan, perpaja hukum.

Tiga perma tersebut tentu r lesaian tidak ha pemerintah, tapi yang turut mene KUMKM. Mereka satu padu mende pergerakan KUM cepat. Tak perlu



am nasional dari upaya kemampuan Di bidang esar dengan redit telah rbaikan dan

ukan secara oleh sektor upaya untuk melakukan skim kredit an sistem ya kepada nemperluas paya-upaya l, baik dari

pelaku bisnis. lagi dipandang nata. Alasannya Sejarah keter- Indonesia men- ebagian besar esar (korporasi) ii krisis moneter al 1998, KUMKM bahkan mampu

bergerak maju hingga hari ini. Tak heran jika perbankan ramai-ramai mengucurkan dananya di sektor KUMKM hingga mencapai 400 triliun lebih.

KUMKM telah memberikan andil serta kontribusi yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan kerja. Menurut data Bank Indonesia (BI), sektor ini mampu menyerap 79,04 juta tenaga kerja atau 99% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi KUMKM terhadap total produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan, yakni 57%. Dengan kondisi seperti itu, peran KUMKM bagi perekonomian bangsa menjadi sangat penting. Kendati begitu, perhatian dan kesempatan yang diberikan pemerintah untuk pengembangan KUMKM masih dirasakan belum optimal. Akibatnya, pengembangan KUMKM pun sesungguhnya belum maksimal. Secara umum, ada tiga persoalan utama yang masih menjadi pengganjalanya.

a. Masalah mendasar (*basic problems*), yakni keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran.

b. Kalaupun suatu KUMKM telah berhasil melewati fase akses keuangan dan pemasaran, permasalahan lanjutan (*advanced problems*) masih merintanginya, yakni pengenalan dan penetrasi pasar baik domestik maupun ekspor yang sangat terbatas dan minim.

c. Permasalahan berikutnya adalah *intermediate problems* yang datang dari instansi terkait, seperti perizinan, perpajakan, agunan, dan hukum.

Tiga permasalahan utama tersebut tentu menuntut penyelesaian tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi berbagai pihak yang turut menentukan kemajuan KUMKM. Mereka selayaknya bersatu padu mendorong terciptanya pergerakan KUMKM yang lebih cepat. Tak perlu lagi ada saling

lempar tanggung jawab. Tak perlu lagi sekadar saling himbau atau saling menyalahkan. Terobosan baru untuk pengembangan KUMKM secara lebih luas dan besar mesti segera dilakukan. Misalnya, KUMKM yang skala usahanya berhasil naik kelas diberi peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, KUMKM yang masih berkutut dengan berbagai persoalan mendasar atau *basic problems* harus tetap diberi penyuluhan yang efektif dan akses yang luas ke arah kemampuan mengatasi beragam problem yang dihadapinya. Di sisi lain, pemerintah makin menyokong dengan kebijakan dan sistem birokrasi yang mampu menguatkan peran dan daya saing KUMKM. Hanya dengan cara seperti itu, perkembangan KUMKM bisa lebih optimal.

Peran KUMKM sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. KUMKM memiliki jumlah 44,8 juta unit usaha, yang berkontribusi secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 77,6 juta (99,4% total angkatan kerja yang bekerja) dan sumbangan PDB Nasional (54,22%). Populasinya yang berjumlah sekitar 51,26 juta unit usaha adalah 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di tanah air. Sedangkan jumlah usaha kecil sebesar 450 ribu unit atau 13% dari jumlah perusahaan, serta usaha menengah dan besar sebesar 450 ribu unit atau 13% dari jumlah perusahaan, serta usaha menengah dan besar sebesar 200 ribu unit atau 0,6% dari jumlah perusahaan. Khusus usaha mikro dan kecil, sekitar 16,35 juta unit merupakan sektor informal, serta 17,6 juta unit merupakan semi informal dan formal. Selanjutnya, bila dilihat secara sektoral untuk usaha mikro dan kecil, sektor pertanian mempunyai kontribusi terbesar yaitu sekitar 19,5 juta unit atau 57%,

industri besar 2,5 juta unit atau 7% serta perdagangan dan jasa sebesar 12,45 juta unit atau 36%.

## II. Perkembangan SKIM Kredit KUMKM Perbankan (Era Orde Baru S/D Era Kabinet Indonesia Bersatu)

Sejak awal pembangunan nasional, perbankan telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan usaha kecil dengan menyediakan kredit yang dapat menunjang pembiayaan usaha kecil dan koperasi melalui berbagai fasilitas kredit kecil bersubsidi. Hal ini dimulai dengan diperkenalkannya pola Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, pola tersebut diikuti oleh beberapa pola kredit koperasi dan kredit kecil lainnya seperti Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja (KI/KMK) s.d Rp. 75 juta, Kredit Mini- Kredit Midi, Kupedes, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Keppres 14A/198, Kredit Profesi Guru (KPG), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), dan lain-lain.

Di samping itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi, maka perbankan juga memberikan kredit kepada koperasi antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD (KKUD), dan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Skim kredit koperasi dan kredit tersebut didukung Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan persyaratan yang ringan seperti suku bunga rendah, tidak mutlak diperlukan dana sendiri, jaminan cukup proyek/usaha yang dibiayai, penilaian kredit lebih ditekankan pada kelayakan usaha. Selain itu untuk mengurangi risiko, kredit diasuransikan kepada PT. Askrindo dan Perum PKK untuk kredit kepada koperasi.

Pemberian kredit koperasi dan kredit kecil tersebut telah mem-



berikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa program pemberian kredit tersebut telah memberikan sumbangan yang menentukan dalam usaha pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Selain itu, dari studi dampak yang dilakukan Bank Indonesia, program kredit tersebut telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan pengusaha kecil, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai tambah, produksi dan investasi.

Penyediaan bantuan dana bersubsidi tersebut dimungkinkan karena meningkatnya penerimaan negara yang cukup besar dari minyak dan gas bumi (migas). Akan tetapi dengan semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas sejak pertengahan 1980-an, maka demi mempertahankan kelanjutan pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan dan dengan tetap mempertahankan kestabilan moneter, perlu dilakukan penyesuaian strategi dan kebijaksanaan pemberian fasilitas dalam pengembangan usaha kecil. Untuk menjaga dan mempertahankan hasil yang telah dicapai sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan penyempurnaan sistem perkreditan yang dikenal dengan Paket Kebijakan 29 Januari 1990 (Pakjan 90). Kebijaksanaan penyempurnaan sistem perkreditan ini bertujuan untuk memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional. Sejalan dengan ini, peranan Bank Indonesia didudukkan secara lebih tepat sebagai *lender of last resort* dan bukan sebagai *lender of first resort* seperti dalam mekanisme KLBI yang selama ini berlaku. Peranan Bank Indonesia dimantapkan

sebagai pemelihara keseimbangan moneter, sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank di Indonesia dapat berkembang makin sehat. Sistem perkreditan nasional lebih di-sehatkan, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat ke arah kegiatan produktif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, dan sekaligus meningkatkan pengedaran dana masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada KLBI. Program kredit bagi usaha kecil disempurnakan agar pelaksanaannya lebih mantap dan makin terarah, serta didukung dan dilakukan secara lebih luas oleh semua pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah kebijakan perkreditan adalah mengurangi secara bertahap peranan KLBI dalam pemberian kredit perbankan untuk berbagai program dan kegiatan, dan untuk selanjutnya meningkatkan peranan perbankan dalam penyediaan dana dan pemberian kredit untuk berbagai keperluan tersebut. KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi, serta peningkatan investasi untuk sektor tertentu.

Menyederhanakan struktur suku bunga, sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar dengan tingkat yang wajar, dengan mengupayakan penurunan suku bunga sehingga dapat mencapai tingkat yang wajar antara lain melalui pengendalian inflasi dan kurs mata uang rupiah terhadap valuta asing, melalui kebijakan moneter yang menggunakan alat-alat kebijakan tidak langsung sesuai dengan alam deregulasi. Semua bank diwajibkan untuk menyediakan kredit kepada usaha kecil minimum 20% dari jumlah pemberian kredit setiap bank, dimana kredit tersebut merupakan

Kredit Usaha Kecil (KUK).

Sejak adanya kebijakan tersebut, pola kredit yang didukung oleh KLBI hanya terbatas bagi Kredit kepada Koperasi yaitu KUT, KKUD, dan KKPA; Kredit kepada Bulog untuk Pengadaan Pangan Nasional; dan Kredit Investasi untuk sektor tertentu. Kredit investasi tersebut diberikan untuk semua sektor yang diberikan oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembangunan; dan sektor perkebunan seperti PIR-Trans, PIR, PSN dan PRPTE yang diberikan oleh bank-bank umum dan pembangunan; serta KPR yang diberikan oleh lembaga keuangan yang ditugasi untuk itu. Kredit investasi ini akan dikurangi secara bertahap, dan diakhiri pada bulan Maret 1994 untuk Kawasan Barat Indonesia dan bulan Maret 1995 untuk Kawasan Timur Indonesia. Untuk skim kredit di luar skim-skim kredit tersebut di atas, dibiayai dana masyarakat yang dihimpun perbankan.

Dengan penyempurnaan sistem perkreditan tersebut di atas, maka bidang keuangan nasional melangkah lebih maju lagi. Bank-bank makin berkembang sebagai pengelola dan pelaksana utama dari perkreditan nasional, dan KLBI diupayakan untuk diturunkan secara berangsur-angsur sehingga akhirnya perbankan dapat membiayai pemberian kredinya dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Di samping itu, program KUK yang mendapatkan dukungan dan partisipasi menyeluruh dari semua bank dapat makin meningkatkan dan memperbesar kemampuan serta peranan usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan nasional, yang pada gilirannya akan membantu tercapainya sasaran pemerataan, kesempatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, untuk lebih mendorong pemberian kredit perbankan termasuk KUK, telah

dikeluarkan Pak Mei 1993 (Pakm menyempurnakan yang menyangku Rp. 200 juta Mei Di samping itu, antar bank dalam yang terdiri dari langsung dari ba BPR, pola p (*channeling*), p bersama (*joint fin* piutang (*factorin* dengan diperken sama melalui S pada itu, unt pemberian KUK c Bank Umum da prestasinya dal KUK dan mem BPR. Hal ini mer BPR berlokasi c lebih mengenal p wilayahnya, sehi akan mampu m nya dan mem bangan dunia terutama usaha k

Kebijaksanaan serangkaian kebij telah memberikan terhadap penyal masuk pemberia koperasi yaitu da pada akhir Dese ningkat menjadi triliun, atau naik 20% per tah kenaikan total kri pada periode yan 18,5% per demikian kenaik masih lebih baik c total kredit. Ke nunjukkan adan perbankan dalam kecil.

Berdasarkan Indonesia Tahun 1 plafon kreditnya, KUK dinikmati r plafon kredit s.d. sekitar 25,3% dinikmati nasabah kredit di atas Rp.



(KUK). Kebijakan ini yang didukung terbatas bagi operasi yaitu KUT, Kredit kepada Lembaga Pangan Kredit Investasi tertentu. Kredit diberikan untuk diberikan oleh yang bergerak bangunan; dan in seperti PIR dan PRPTE yang bank-bank umum; serta KPR yang lembaga keuangan untuk itu. Kredit dikurangi secara khiri pada bulan Kawasan Barat dan Maret 1995 Timur Indonesia. di luar skim-skim li atas, dibiayai yang dihimpun

penyempurnaan tersebut di atas, jangan nasional maju lagi. Bank-embang sebagai elaksana utama asional, dan KLBI uk diturunkan angsur sehingga an dapat mem-kredimya dengan un dari masya-itu, program KUK n dukungan dan uruh dari semua n meningkatkan ar kemampuan saha kecil dan pembangunan pada gilirannya u tercapainya an, kesempatan i penciptaan

untuk lebih men-an kredit per-k KUK, telah

dikeluarkan Paket Kebijakan Mei 1993 (Pakmei 93), antara lain menyempurnakan ketentuan KUK yang menyangkut plafon kredit dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 250 juta. Di samping itu, pola kerjasama antar bank dalam penyaluran KUK yang terdiri dari pemberian kredit langsung dari bank umum kepada BPR, pola penerusan kredit (*channeling*), pola pembiayaan bersama (*joint financing*) dan anjak piutang (*factoring*) telah diperluas dengan diperkenalkan pola kerjasama melalui SBPU-KUK. Dalam pada itu, untuk mengarahkan pemberian KUK di pedesaan, maka Bank Umum dapat meningkatkan prestasinya dalam menyalurkan KUK dan membantu pendanaan BPR. Hal ini mengingat, umumnya BPR berlokasi di pedesaan dan lebih mengenal para pengusaha di wilayahnya, sehingga diharapkan akan mampu memperluas usahanya dan membantu pengembangan dunia usaha setempat, terutama usaha kecil.

Kebijakan Pakjan 90 dan serangkaian kebijakan lanjutan telah memberikan dampak positif terhadap penyaluran KUK, termasuk pemberian kredit kepada koperasi yaitu dari Rp. 14,0 triliun pada akhir Desember 1989, meningkat menjadi sebesar Rp. 36,6 triliun, atau naik dengan rata-rata 20% per tahun, sedangkan kenaikan total kredit dalam rupiah pada periode yang sama rata-rata 18,5% per tahun. Dengan demikian kenaikan KUK tersebut masih lebih baik daripada kenaikan total kredit. Keadaan ini menunjukkan adanya kesungguhan perbankan dalam membina usaha kecil.

Berdasarkan data Bank Indonesia Tahun 1995, penyebaran plafon kreditnya, 44,9% dari total KUK dinikmati nasabah dengan plafon kredit s.d. Rp. 25 juta, dan sekitar 25,3% dari total KUK dinikmati nasabah dengan plafon kredit di atas Rp. 25 juta s.d. Rp.

100 juta. Sedangkan sisanya, sebesar 29,8% dinikmati oleh nasabah dengan plafon kredit di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta. Secara keseluruhan, rata-rata KUK relatif kecil yaitu Rp. 6,2 juta per rekening. Dengan demikian, sebagian besar dari KUK masih dinikmati oleh usaha kecil yang plafon kreditnya relatif kecil.

Sedangkan berdasarkan sektor ekonominya, sebagian besar (35,7%) dari total KUK atau Rp. 13,0 triliun (17,3%), perindustrian sebesar 3,2 triliun (8,9%), pertanian sebesar Rp. 2,5 triliun (6,8%) dan sektor lain-lain Rp. 11,6 triliun (31,3%). Mengingat prioritas Pelita VI antara lain adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian maka pemberian KUK untuk pengembangan kedua sektor tersebut masih perlu ditingkatkan khususnya dalam pola keterkaitan antara pertanian dan perindustrian (agro industri).

Berdasarkan penyebaran daerah, terlihat bahwa pengsa KUK di perkotaan mengalami penurunan sebesar 18,1% yaitu dari 78,2% menjadi 60,1%, atau sebesar Rp. 22,0 triliun ada di perkotaan. Dengan demikian pangsa KUK di pedesaan mengalami kenaikan dari 21,8% menjadi 39,9% atau sebesar Rp 14,6% triliun ada di pedesaan. Namun dilihat dari jumlah rekeningnya, sebesar 3,8 juta rekening ada di pedesaan, sedangkan di perkotaan hanya 2,1 juta rekening. Dengan demikian, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan arah pemberian KUK ke area pedesaan dan diharapkan untuk lebih ditingkatkan di masa mendatang.

Selama kurun waktu 4 tahun (1990-1995), berdasarkan penyebaran di Jawa dan di luar Jawa dapat dilihat bahwa 67,1% dari total KUK atau Rp. 24,5 triliun masih ada di Jawa. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 21,1 triliun ada

di luar Jawa. Untuk itu arah pemberian KUK perlu dilakukan ke luar Jawa khususnya Kawasan Timur Indonesia yang banyak mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

### 3.1. Permasalahan Pelaksanaan KUK

Melihat keragaman tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan perkreditan (Pakjan 90) telah berhasil dengan baik, karena kebijakan tersebut mempunyai dampak positif yaitu KUK telah berkembang cukup pesat selama 4 tahun terakhir. Namun demikian disadari bahwa saat ini masih ada keluhan dari sebagian masyarakat (usaha kecil) mengenai sulitnya memperoleh KUK atau akses kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa KUK belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi baik dari pihak pengusaha kecil maupun pihak bank.

Dari sisi permintaan, umumnya kendala nasabah usaha kecil untuk memperoleh KUK adalah belum mampu mengungkapkan kelayakan usahanya, adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi, serta belum mampu memenuhi persyaratan bank teknis, antara lain jaminan dan perizinan.

Secara sektoral kendala yang dihadapi usaha kecil adalah sbb:

a. Di sektor pertanian, antara lain lemahnya kemampuan pengelolaan sumber daya lahan, lemahnya lembaga dan organisasi di daerah pedesaan, kurangnya infrastruktur terutama transportasi dan komunikasi, kurangnya dukungan dari lembaga keuangan formal dan keterbatasan penguasaan teknologi.

b. Di sektor perindustrian, antara lain mesin dan peralatan kurang memadai, mutu bahan masukan kurang sesuai, kurang menghimpun



teknologi, kelemahan dalam rekayasa, organisasi, pengendalian produksi dan kelemahan dalam bidang akuntansi dan pengadaan biaya.

C. Di sektor perdagangan dan jasa, umumnya belum efisien, masih kurang penguasaan teknologi dan tenaga kerja yang berkecakupan rendah.

Dari sisi perbankan, beberapa kendala dalam penyaluran KUK adalah tingginya biaya transaksi, sulitnya memperoleh usaha kecil yang layak, tingginya risiko dan terbatasnya jaringan kantor cabang bank. Dalam hal biaya transaksi pinjaman, terdapat 2 ciri khusus yang cukup penting dan berpengaruh terhadap ekonomi lembaga keuangan dan perilaku pinjaman. Pertama, adalah biaya yang tercermin dalam R/L yang tergantung kepada jumlah peminjam, sedangkan pendapatan secara tersendiri tergantung kepada besarnya volume kredit. Kedua, beberapa literatur mengasumsikan bahwa biaya transaksi dalam hal waktu kerja staf dan pekerjaan administrasi adalah sama untuk jumlah nilai kredit yang berbeda-beda. Sebaliknya pendapatan bunga yang diterima bergantung kepada besarnya jumlah pinjaman. Sehingga lembaga keuangan/bank cenderung memberikan kredit skala besar untuk menurunkan biaya per unit (*relative transaction costs*) untuk meningkatkan keuntungan. Dengan demikian maka biaya transaksi untuk kredit skala kecil menjadi relatif tinggi.

### 3.2. Upaya Mengoptimalkan KUK

Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka mengoptimalkan pengembangan usaha kecil dan koperasi terutama ditujukan untuk mendorong dan membantu meningkatkan kemampuan perbankan dalam rangka memperluas akses para pengusaha kecil

terhadap kredit dan jasa perbankan. Peningkatan kemampuan ini menyangkut kerangka pengaturan, teknis perbankan, kelembagaan, maupun pendanaan. Di pihak lain, usaha untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan para pengusaha kecil di bidang teknis dan kewirausahaan pada dasarnya merupakan tugas bersama yang menyangkut berbagai instansi dan lembaga.

Oleh karena itu, mobilisasi daya dan dana yang lebih maksimal serta koordinasi yang lebih terpadu, sangat diperlukan diantara berbagai instansi dan lembaga tersebut. Bank Indonesia melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) dan Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), di samping berusaha memecahkan masalah kelembagaan dan pendanaan, juga berusaha meningkatkan komitmen dan kemampuan perbankan dalam mengidentifikasi sektor usaha serta pengusaha kecil yang potensial, memberikan bimbingan teknis dan mengembangkan cara dan sistem pelayanan yang dapat mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh tingginya risiko dan biaya transaksi. Secara lebih rinci, strategi dan kebijaksanaan yang telah dan akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk lebih mendorong peningkatan dan pengembangan kredit kecil dan koperasi di masa mendatang dapat dikemukakan berikut ini.

Pengembangan kelembagaan Mendorong dan membantu meningkatkan kemampuan perbankan untuk memperluas akses para pengusaha kecil terhadap kredit dan jasa perbankan. Peningkatan kemampuan ini menyangkut antara lain usaha untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kemampuan bank dalam melayani usaha kecil antara lain dengan lebih memanfaatkan BPR dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan

(LDKP) yang mempunyai jaringan kantor relatif tersebar di wilayah pelosok pedesaan; memprioritaskan pembukaan kantor bank umum di luar Dati I dan Dati II; dan memberikan pelatihan teknis operasional bank kepada petugas BPR/LDKP melalui berbagai program pelatihan.

Pengembangan kredit program Kredit program yang ada pada saat ini, baik yang masih didukung dengan KLBI, terutama Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD (KKUD), dan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), maupun yang merupakan program *Two-Steps-Loan* (TSL), akan lebih ditingkatkan dan diperluas penggunaannya, antara lain melalui penyempurnaan pola-pola kredit tersebut.

#### a. Kredit Usaha Tani (KUT)

Tujuan pemberian KUT adalah membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usahanya, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, dan membantu KUD agar dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat berperan sebagai satu kekuatan ekonomi yang mantap di pedesaan. Pola KUT diperluas sehingga dapat digunakan untuk membiayai komoditas hortikultura, yang terdiri dari pisang, nenas, pepaya, markisa, jeruk, salak, cabai merah, bawang merah, kentang dan jahe. Diversifikasi komoditas tersebut merupakan alternatif bagi petani yang lahannya relatif kecil yang mengakibatkan petani tersebut sulit untuk melakukan budidaya tanaman pangan. Dalam kaitan ini, peranan koperasi yang lebih besar sangat diperlukan dalam aspek pemasaran hortikultura tersebut.

Untuk mempercepat akselerasi maka dibuat KUT Pola Khusus adalah Pertama, pencairan KUT Pola Khusus, dengan ketentuan yang berbeda dengan pola umum yaitu dilakukan dalam bentuk tunai sekaligus untuk kebutuhan

intensifikasi pada hortikultura. Sedangkan pada berjalan, peny dilakukan oleh setiap musim peranan kelompok ditingkatkan dan kebersamaan dan renteng sebagai Kelompok tani untuk menu budaya menabur kelompok tani terbentuknya yang dapat dig tani dan peni dengan kredit, k kredit karena tid akan diatasi. penyalurannya Prosedur penga kredit dari peta memperoleh KI diperlukan dua disederhanakan tahap. Ketiga meliputi; petani nya mengajukan KUD, kemudian mengkoordinir kepada bank selanjutnya bank memberikan KUT kelompok tani y Dan Keempat, komponen struktur bunga yang sen meliputi bunga k diubah menjadi imbalan dan tabu Walaupun telah Pola Khusus, berjalan selama Umum) tetap beberapa penye bahwa kelompok mempunyai tab dan disimpan di berlaku untuk Po kedua program diharapkan dan ningatkan dan berian kredit u



punyai jaringan sebar di wilayah; memprioritas-  
antor bank umum an Dati II; dan latihan teknis kepada petugas melalui berbagai

n kredit program ng ada pada saat masih didukung terutama Kredit ), Kredit kepada i Kredit Koperasi gotanya (KKPA), upakan program TSL), akan Iebih diperluas peng- ra lain melalui pola-pola kredit

ni (KUT)  
n KUT adalah i yang belum ai sendiri usaha a dapat me- jksi dan pen- membantu KUD mengembangkan ga dapat ber- satu kekuatan itap di pedesaan. i sehingga dapat ik membiayai tura, yang terdiri enas, pepaya, ak, cabai merah, ntang dan jahe. oditas tersebut atif bagi petani latif kecil yang etani tersebut ukan budidaya Dalam kaitan ini, yang lebih besar i dalam aspek tura tersebut. apat akselerasi F Pola Khusus pencairan KUT ngan ketentuan gan pola umum am bentuk tunai k kebutuhan

intensifikasi padi, palawija dan hortikultura selama 1 tahun. Sedangkan pada KUT yang saat ini berjalan, penyaluran kreditnya dilakukan oleh bank kepada KUD setiap musim tanam. Kedua, peranan kelompok tani akan lebih ditingkatkan dari segi organisasi, kebersamaan dan tanggung jawab renteng sebagai penerima kredit Kelompok tani dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan budaya menabung para anggota kelompok tani dan mendorong terbentuknya akumulasi modal yang dapat digunakan kelompok tani dan pengkaitan tabungan dengan kredit, kesulitan pemberian kredit karena tidak adanya agunan akan diatasi. Ketiga, prosedur penyalurannya disederhanakan. Prosedur pengajuan permohonan kredit dari petani sampai dengan memperoleh KUT yang semula diperlukan dua belas tahap, disederhanakan menjadi cukup tiga tahap. Ketiga tahap tersebut meliputi; petani melalui kelompok-nya mengajukan kredit kepada KUD, kemudian KUD secara kolektif mengkoordinir pengajuan kredit kepada bank setempat, dan selanjutnya bank tersebut dapat rmemberikan KUT langsung kepada kelompok tani yang bersangkutan. Dan Keempat, penyempurnaan komponen struktur bunga. Struktur bunga yang semula komponennya meliputi bunga kredit dan imbalan, diubah menjadi bunga kredit, imbalan dan tabungan kelompok. Walaupun telah diberlakukan KUT Pola Khusus, pola KUT yang berjalan selama ini (KUT Pola Umum) tetap berlaku dengan beberapa penyesuaian, antara lain bahwa kelompok tani diwajibkan mempunyai tabungan, kelompok dan disimpan di bank, seperti juga berlaku untuk Pola Khusus. Adanya kedua program KUT tersebut diharapkan dapat lebih meningkatan dan memperluas pemberian kredit untuk mendukung

pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi.

#### b. Kredit Kepada KUD (KKUD)

Tujuan pemberian kredit kepada KUD adalah untuk membantu permodalan KUD di dalam melaksanakan program pemerintah, guna menampung hasil produksi petani agar tingkat harga yang wajar yang dibayarkan kepada petani cukup terjamin.

Untuk membantu kelancaran pemasaran komoditas-komoditas yang dibiayai dengan KUT, maka skim KKUD juga diperluas sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengadaan komoditas hortikultura, yang dilaksanakan secara selektif komoditas dan daerahnya dalam rangka menjamin pemasarannya.

#### c. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)

Tujuan pemberian KKPA adalah untuk menyediakan fasilitas permodalan anggota koperasi guna menunjang peningkatan usaha dan pendapatan mereka, sekaligus untuk mengembangkan kegiatan koperasi.

Plafon kredit kepada masing-masing anggota koperasi yang semula sebesar Rp. 30 juta ditingkatkan menjadi Rp. 50 juta. Dapat ditambahkan pula bahwa KKPA ini dapat digunakan untuk membiayai program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Kredit diberikan oleh semua bank umum yang sekurang-kurangnya cukup sehat. Pemberian KKPA ini akan diutamakan untuk mendorong pola kemitraan antara pada pengusaha kecil dengan pengusaha besar dan sekaligus mendorong perkembangan koperasi dan transmigrasi.

#### d. Two-Step-Loan (TSL)

Sedangkan dalam rangka mengatasi kelangkaan dana jangka panjang di dalam negeri untuk pembiayaan investasi, pinjaman luar negeri (TSL) akan terus ditingkatkan dari negara donor atau lembaga keuangan internasional, antara lain Bank

Dunia, Overseas Economic Cooperation Fund/Asean Japan Development Fund (OECA/JADF), Exim Bank of Japan, dan Asian Development Bank (ADB).

### IV. Kebijakan Pasca KLBI

Setelah reformasi di sektor moneter tahun 1998, maka peran KLBI ditiadakan dari Bank Indonesia sehingga saat ini yang melaksanakan skim-skim tersebut di atas adalah Perbankan, baik BPR maupun Bank Umum. Sedangkan Bank Indonesia berperan secara tidak langsung dalam menggerakkan sektor riil antara lain dengan memberikan Bantuan Teknis (PBI No. 8 Tahun 1997), bagi pelaku Perbankan yang memerlukan bantuan baik keterampilan teknis untuk kredit KUMKM ataupun penyediaan Informasi-informasi yang diperlukan tentang KUMKM.

Seiring dengan perkembangan dalam program-program pemberdayaan KUMKM, yang saat ini telah mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang KUMKM, maka skim kredit yang diluncurkan oleh Lembaga Keuangan baik Bank maupun non Bank saat ini mengacu pada UU tersebut.

### V. Penutup

1. Pengembangan KUMKM, merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha kecil perlu diberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Di bidang keuangan, perbankan pada dasarnya telah memberikan perhatian yang cukup besar dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit kecil.

2. Namun disadari bahwa pemanfaatan fasilitas kredit perbankan belum dapat dilakukan



secara optimal oleh sektor usaha tersebut, karena berbagai kendala yang dihadapi baik oleh sektor perbankan maupun pelaku usaha. Untuk itu, masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses KUMKM kepada kredit perbankan dengan cara melakukan penyempurnaan kebijaksanaan Kredit KUMKM untuk memberikan iklim yang kondusif, perlu dikembangkan sistem kelembagaan perbankan yang sehat agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada KUMKM, dan perlu pengembangan berbagai program dan proyek untuk memperluas pembiayaan ke sektor usaha yang strategis dan berdampak luas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kredit usaha kecil secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Upaya pengembangan KUMKM bukanlah semata-mata tanggung jawab dunia perbankan, melainkan

juga merupakan tugas dan komitmen dari semua pihak, hal ini karena permodalan adalah hanya salah satu aspek, di samping masih ada aspek-aspek lain yang lebih penting seperti pemasaran, teknologi dan manajemen yang harus ditingkatkan.

4. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan KUMKM, perlu terus dilakukan dan dikembangkan kerjasama dan koordinasi secara terpadu antara perbankan dengan instansi terkait terutama dalam hal pemberian bantuan teknis untuk dapat meningkatkan kelayakan usaha KUMKM.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Salam. *Perkembangan Kredit Usaha Kecil*. Biro Kredit Bank Indonesia. Jakarta 1995  
Bank Indonesia. *Laporan Tahun 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995*

....., *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8 Tahun 2007*

Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta 1998

Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2000

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2001

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo. Jakarta. 2000

M. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta 2002

#### Riwayat Penulis

**Dr. Heri Nugraha .SE, M.Si** Adalah Dosen Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).

#### Abstrak

Pertanian meningkat tanaman. penggunaan serta men genetika, menjaga menyatakan tahun telah terhadap pertanian dengan biologis ya

#### Pendahuluan

##### 1. Latar Belakang

Sejalan d meningkatnya ke akan kerusakan munculnya be penyakit yang penggunaan ba berlebihan menyebabkan alternatif pert menjadi pilihan b Pertanian organik satu alternatif sel bertani selaras mengembalikan dalam suatu are